

ASPEK BIOPOLITIK DALAM SEKURITISASI COVID-19 OLEH WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)

Nur Nashuhah, Mohamad Dziqie Aulia Al-Farauqi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas
Muhammadiyah Kalimantan Timur

mdaa343@umkt.ac.id

Abstract

This article critically engages with recent efforts to frame the global COVID-19 pandemic as an international security issue. The securitization of COVID-19 is important, according to the article, not only because it is a new way to conceptualize the global COVID-19 pandemic, but also because it marks an important contemporary site for the global spread of the rotating biopolitical economy of power. about the government of 'life'. The biopolitical dimension of the securitization of COVID-19 by WHO (World Health Organization) plays a series of social practices that have the potential to give rise to normalization or a new normal which, according to the article, international political actors must avoid in their efforts to find appropriate and effective responses to the global COVID - 19 pandemic. How to minimize this danger is explored in the conclusion of this article.

Keywords: Covid-19, biopolitics, biopower, Foucault, normalization securitization, security

Abstrak

Artikel ini secara kritis terlibat dengan upaya baru-baru ini untuk membingkai pandemi global COVID-19 sebagai masalah keamanan internasional. Sekuritisasi COVID-19 itu penting, menurut artikel itu, bukan hanya karena itu adalah cara baru untuk mengkonseptualisasikan pandemi COVID-19 global, tetapi juga karena menandai situs kontemporer yang penting untuk penyebaran global ekonomi biopolitik kekuasaan yang berputar. seputar pemerintahan 'kehidupan'. Dimensi biopolitik pada sekuritisasi COVID-19 oleh WHO (World Health Organization ini memainkan serangkaian praktik sosial yang berpotensi memunculkan normalisasi atau new normal yang menurut artikel tersebut, harus dihindari oleh aktor politik internasional dalam upaya mereka untuk menemukan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap pandemi global COVID- 19 pandemi. Cara meminimalkan bahaya ini dieksplorasi dalam kesimpulan artikel ini.

Kata Kunci : Covid-19, biopolitik, biopower, Foucault, normalization securitization, security

1. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 hingga kini dunia internasional masih terguncang keras oleh adanya krisis pandemi global *Corona Virus Disease* atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Awal kemunculan virus ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei China pada 31 Desember 2019 yang saat itu resmi diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) dengan 2019-nCov (novel coronavirus). Sejak awal pemberitaan tentang isu virus ini oleh media internasional, pada dasarnya telah menyebar keseluruh dunia. Hal ini terbukti dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak awal kemunculannya, penyebaran virus corona terus berkembang dan telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang dari 123 negara baik dari Asia, Amerika Serikat, Eropa, hingga Afrika Selatan. Oleh karena itu sebagai organisasi internasional WHO resmi menetapkan status pandemi global pada 11 Maret 2020. Penetapan corona virus yang sebelumnya merupakan isu kesehatan epidemi hingga menjadi wabah pandemi oleh WHO dilihat melalui bagaimana wabah COVID ini mampu menyebar yang pada mulanya ditemukan hanya dikota

Wuhan kini banyak ditemukan diluar area geografis yang lebih luas. Sehingga hal ini dipercaya oleh WHO dan pemerintah China bahwa virus corona mampu menyebar secara lebih luas melewati lintas batas negara terlebih sulit diketahui keberadaan dan sifatnya yang sulit terdeteksi mampu memberikan efek berbahaya yang mampu menginfeksi banyak orang.

Sebelum penetapan COVID-19 sebagai pandemi global, pada tanggal 30 Januari 2020 WHO dengan mengikuti imbauan dari International Health Regulation (IHR) melalui Emergency Committee, Dirjen WHO menyatakan wabah virus corona di Cina sebagai situasi darurat kesehatan global sehingga memerlukan penanganan internasional atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Di mana

PHEIC ditujukan untuk dapat memobilisasi respons internasional yang terkoordinasi terhadap wabah pandemi. Sehingga sejak diumumkan pada 4 maret 2020, 77 negara telah melaporkan kasus COVID-19 dan selang beberapa hari ditetapkanlah COVID-19 sebagai pandemi global.

Berdasarkan pada perhitungan WHO dan Jhon Hopkins University, pada Oktober 2020 jumlah total kasus COVID-19 telah meningkat sangat tinggi yaitu mencapai 35.692.475 juta kasus yang terinfeksi COVID-19 diseluruh dunia dengan total kematian mencapai sebanyak 1.045.823 juta jiwa dan kesembuhan sebanyak 26.853.031 orang. Agar mampu menekan penyebaran virus corona, WHO mengimbau kepada seluruh negara pemerintah, masyarakat dunia, dan organisasi internasional untuk bekerjasama dalam mendeteksi, menguji, mengobati, mengisolasi, melacak dan memobilisasi orang-orang sebagai merespon tantangan pandemi COVID-19 dikarenakan pandemi COVID-19 dinilai sebagai ancaman krisis multidimensi yang tidak hanya merugikan kesehatan manusia tetapi seluruh tata-tatanan sosial baik ekonomi dan politik.

Pada 4 Februari 2020 WHO mengeluarkan SPRP (Strategic Preparedness and Response Plan) COVID-19 yang bertujuan untuk mengarahkan langkah-langkah tindakan yang diambil

agar terkoordinasi baik pada tingkat nasional, global, dan regional dalam melawan penyebaran virus. Seperti menyiapkan sistem tanggap darurat untuk meningkatkan kapasitas untuk mendeteksi dan merawat pasien, memastikan rumah sakit memiliki ruang persediaan, dan personel yang dibutuhkan untuk mengembangkan intervensi medis yang menyelamatkan jiwa, mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan tingkat penyebaran dan angka resiko kematian yang tinggi dari pandemi COVID-19 telah menyebabkan seluruh negara di dunia baik pemerintah, para pekerja kesehatan umum, dan para aktor internasional yang memiliki peranan penting untuk mengatasi permasalahan ini untuk tidak hanya mengkategorikan pandemi global tersebut sebagai isu krisis kesehatan masyarakat, akan tetapi juga sebagai sebuah isu keamanan internasional. WHO telah menekankan sejak awal masuknya kasus COVID-19 agar seluruh negara didunia untuk baik seluruh pemerintah, dan elemen masyarakat di sekitar mulai membangun strategi yang komprehensif untuk mencegah infeksi, menyelamatkan nyawa

dan meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19.

Awal dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19, WHO meminta agar pendekatan utama negara-negara anggota dalam menekan penyebaran virus tersebut adalah dengan menerapkan physical distancing yang sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Tidak hanya menjaga jarak, WHO juga menyarankan agar pemerintah mulai mengatur masyarakat dengan mulai membiasakan diri mencuci tangan menggunakan antiseptik, menghindari keramaian, dan tidak menyentuh sekitar wajah yang mana titik penularan virus. Adapula beberapa negara yang tidak hanya melakukan physical distancing tetapi dengan secara keras melakukan lockdown total di negaranya. WHO juga menekankan agar negara mengkoordinasikan ancaman yang terjadi yaitu dengan memastikan transmisi penularan corona terkendali, fasilitas kesehatan mempunyai dalam mendeteksi penularan virus, melakukan pengamanan ditempat umum, dan mulai mendidik komunitas tentang adanya normal baru (*new normal*). Adanya langka-langkah

rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh WHO melalui wacana pencegahan penyebaran COVID-19 menjadi dasar bagi setiap negara anggota untuk diimplementasikan oleh masing masing pemerintah di daerah demi menjangkau keamanan bersama.

Pada dasarnya WHO sebagai organisasi kesehatan internasional dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyebaran COVID-19 bahkan sebagai kekuatan utama ditingkat global yang juga mampu mempengaruhi di tingkat negara terutama dalam mengatur kebijakan secara global untuk diimplementasikan oleh tiap negara-negara anggota dalam menekan penyebaran COVID-19. Situasi yang tengah dihadapi oleh negara-negara didunia kini dengan menerapkan aturan atau kebijakan kepada masyarakat merupakan desakan oleh WHO yang harus diikuti oleh negara anggota untuk keamanan. Adanya upaya pencegahan dari WHO yang melihat COVID-19 sebagai ancaman global yang tidak hanya berdampak pada keamanan manusia akan tetapi juga mempengaruhi seluruh tatanan

sosial, keamanan, ekonomi, dan politik didunia, sehingga hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir dampak dari penyebaran COVID-19, yang mana WHO memiliki peranan yang sangat besar dalam pengendalian krisis pandemi saat ini terutama dalam menjaga stabilitas penanganan penyebaran COVID-19 secara global. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh WHO dalam membingkai pandemi COVID-19 sebagai ancaman keamanan internasional memiliki aspek biopolitik dalam proses sekuritisasi. Menurut Michel Foucault munculnya peralihan konsep biopolitik dimulai setelah adanya keberadaan biologis tercermin dalam eksistensi politik, seperti terkait fakta hidup manusia bukan lagi substrat yang tidak dapat diakses dan hanya muncul dari waktu ke waktu, ditengah keadaan kematian yang tidak teratur namun sebaliknya di mana keadaan tersebut dikontrol melalui oleh adanya intervensi power and knowledge . Oleh karena itu, biopolitik bisa dikatakan bahwa kehidupan sosial manusia saat ini dengan melalui tubuh telah didominasi, dikendalikan dan diatur oleh apa yang disebut power atau kuasa.

2. Kerangka Pemikiran

2.1. Konsep Biopolitik

Pada dasarnya untuk memahami pengertian biopolitik secara sederhana ialah politik yang sangat memperhatikan kehidupan manusia dengan melalui kehidupan biologis manusia.

Sebagaimana ketika kehidupan manusia sebagai objek politik memberikan pengaruh dasar terutama pada tujuan dan tindakan politik itu sendiri. Untuk memahami lebih jelas terkait konsep biopolitik, penulis mengkonseptualisasikan dengan menggunakan pemikiran Michel Foucault. Foucault merupakan tokoh filsuf pada abad-20 dan sebagai kategori pemikir post-modernis. Menurut Foucault biopolitik dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas politik untuk menguasai kehidupan manusia dalam suatu populasi sebagai subjek untuk diatur. Bagi Foucault munculnya biopolitik dimulai ketika keberadaan biologis mulai tercermin dalam eksistensi politik. Ketika kehidupan bukan lagi substrat yang tidak dapat dicapai akan tetapi kini kehidupan telah masuk sebagai

alat kontrol pengetahuan dan lingkup intervensi atas kekuasaan. Biopolitik digambarkan Foucault sebagai bentuk mekanisme pendisiplinan yang kemudian bertindak sebagai alat kontrol yang ditujukan pada suatu kehidupan manusia (populasi) secara keseluruhan. Di mana aspek biopolitik merupakan wacana strategi yang diterapkan oleh suatu institusi sebagai alat kontrol untuk mengatur populasi disuatu wilayah dengan melalui biopower. Contoh kontrol yang dilakukan oleh suatu institusi seperti adanya rasio kelahiran dan kematian, tingkat reproduksi, kesuburan suatu populasi, pendefinisian universal tentang kesehatan dan hal lain sebagainya. Menurut Foucault untuk mampu menjalankan pendisiplinan yang kemudian akan mengatur kehidupan individu, maka dibutuhkan suatu kuasa. Adanya pola disiplin dan aturan untuk mengontrol suatu individu merupakan bentuk normalisasi kekuasaan yang tengah berlangsung oleh institusi terhadap tubuh individu. Dalam hal ini aspek biopower merupakan bentuk kuasa dalam biopolitik. Biopower dilihat bukan lagi sebuah kuasa yang berdaulat akan

tetapi sebagai bagian *Code of Conduct* yang memiliki pengaruh positif pada aspek kehidupan individu yang kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bentuk alat kontrol total atas tubuh manusia. Dalam studi biopolitik populasi merupakan subjek penting. Penekanan dimensi populasi sebagai suatu kelompok individu biologis dalam biopolitik Foucault merupakan target utama dalam menjalankan biopower pada praktek kehidupan sosial. Selanjutnya cara kerja biopower dalam menjalankan strateginya dengan menggunakan produksi pengetahuan atau *Knowledge* yang mana dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas tinggi untuk dapat mengontrol dan mengendalikan setiap individu ke dalam praktek kehidupan sosial. Di mana adanya kuasa di bentuk, di pelihara dan di dukung melalui pengetahuan. Kemudian sebaliknya kuasa akan membangun suatu rezim kebenaran (*Regime of True*) yang memungkinkan hadir dan diterima oleh pengetahuan tersebut. Menurut Foucault tidak ada pengetahuan yang bersifat netral, yang mana praktek pengetahuan selalu berkaitan erat dengan apa yang dinamakan kekuasaan.

Sebagaimana yang dikatakan Foucault bahwa pada masyarakat modern ini kekuasaan tidak lagi hanya dijalankan melalui kekuasaan kedaulatan tetapi pemahaman kuasa juga dijalankan pada tubuh dengan membentuknya menjadi tubuh yang dapat diatur, patuh, dan berguna. *Governmentality* sebagai bentuk rasionalitas dalam melihat bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan oleh suatu negara atau institusi agar selama proses dijalankannya kekuasaan tersebut dapat diakui dan legitimate¹⁹.

Adanya praktek sosial dalam *governmentality* telah menghubungkan kekuasaan terhadap populasi. Di mana kekuasaan tersebut di internisasikan dalam tubuh sosial sehingga model pendisiplinan dan kontrol tersebut berjalan dalam tubuh individu. Hal ini juga bisa dipahami sebagai (*conduct of conduct*) Di mana strategi dalam mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan melakukan internalisasi secara tidak sadar terhadap suatu populasi agar menjadi patuh dan tunduk. Menurut Foucault dalam pengertiannya tentang *governmentality* ialah sebuah sistem yang dibentuk melalui beragam institusi, analisis, prosedur,

refleksi, kalkulasi, dan taktik yang tepat yang membuat kekuasaan dapat diterapkan pada suatu populasi dengan menggunakan unsur keamanan sebagai mekanisme utama dan ekonomi politik sebagai pengetahuan utama. Sehingga menurut Foucault biopolitik memiliki keterkaitan dengan *governmentality* terutama dalam bentuk kuasa. Hal ini dilihat melalui bagaimana pemerintah memiliki kuasa atas tubuh masyarakat. Sehingga dengan adanya *power* yang sangat kuat dapat mengendalikan dan mengontrol suatu populasi dengan tujuan membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Maka populasi dalam pemikiran Foucault merupakan suatu subjek untuk membantu dalam memecahkan persoalan dengan mengambil tindakan strategi yang tepat dengan tujuan untuk membentuk perilaku manusia yang kemudian akan menghasilkan perbaikan kondisi, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan sebagainya.

2.2. Sekuritisasi

Studi tentang keamanan pada awalnya hanya berfokus pada isu keamanan

tradisional yaitu pada aspek militer. Yang mana disposisinya selalu dipengaruhi oleh pemikiran realisme. Namun seiring berjalanya waktu, pada era akhir 1980-an menjadi awal dari munculnya gagasan baru mengenai keamanan non-tradisional atau ancaman yang bersifat non-militer. Adanya transformasi dari kajian keamanan tradisional menuju non tradisional ini pada dasarnya dipelopori oleh sekelompok pakar keamanan yang dikenal dengan sebutan *Copenhagen School* seperti Barry Buzan, Ole Waver, dan Jaap de Wilde yang mencoba memperluas studi keamanan yang tidak hanya mendiskusikan keamanan negara yang bersifat militeristik, tetapi juga mulai membahas tentang isu nontradisional seperti, HAM, demokrasi, lingkungan, kemiskinan, gender dan lain sebagainya. Dalam hal ini perbedaan aliran pemikiran keamanan tradisional dan non-tradisional terletak pada fokus isu permasalahan yang dihadapi. Di mana pada studi keamanan tradisional lebih cenderung melihat kearah *state-centerism* yang menekankan pada keamanan negara, wilayah, atau pemerintahan tertentu. Sedangkan pada aliran keamanan mahzab

konpenhagen(*nonstate centerism*) fokus utamanya lebih kearah *social society* atau keamanan manusia.

Dalam hal ini, terdapat elemenelemen proses sekuritisasi yang harus diketahui dalam memahami suatu isu ancaman seperti siapa pelakunya dan dalam isu apa, untuk siapa dan mengapa hal tersebut dilakukan, kemudian hasil yang didapati seperti apa dan dalam kondisi bagaimana upaya tersebut dilaksanakan. Setelah mengetahui elemen dari proses sekuritisasi, kemudian mengidentifikasi unit-unit penting yang terdapat dalam proses sekuritisasi yaitu; *securitizing actor*, *Speech act*, *existential threat*, *referent object*, dan *audiance*. Pertama pada proses sekuritisasi terdapat aktor keamanan (*security actor*) yang melakukan eskalasi yang pada mulanya bukan isu keamanan yang mengancam menjadi sebuah isu keamanan. yang dapat mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup yang dinilai vital dan esensial bagi publik (*audience*) yang menjadi sasaran umum melalui sekuritisasi tersebut. Hal ini penting untuk diketahui bahwa dalam proses sekuritisasi, aktor sekuritisasi memiliki

peran penting dalam melakukan identifikasi yang jelas terhadap sebuah isu. Sehingga kemudian ketika telah diketahui bahwa isu tersebut bersifat mengancam maka aktor sekuritisasi melakukan tindakan yang diskursi dengan mewacanakan isu tersebut melalui *Speech act*. *Speech act* dalam trem keamanan sebagai sebuah pengkonsepsian atau konstruksi dalam bentuk ancaman (*existantian threat*) yang dianggap dapat membahayakan keberlangsungan suatu objek atau entitas yang dinilai penting untuk dilindungi dan pertahankan. Biasanya *Speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi berbentuk klaim, peringatan, permintaan, dan konten profesional. Sehingga dengan adanya penekanan bahwa terdapat ancaman eksistensial yang membahayakan kelangsungan suatu entitas ataupun objek yang dinilai penting untuk dipertahankan bagi target *audience*, maka aktor sekuritisasi harus mengambil tindakan darurat agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup tersebut.

Kemudian *referent object* merupakan sebuah entitas yang posisinya

sangat terancam jika suatu isu tidak ditangani secara serius. Dengan adanya tindakan darurat (*urgent*) yang diputuskan oleh aktor sekuritisasi bertujuan agar dapat mempertahankan eksistensi dari *referent object* tersebut. Kemudian adanya tindakan luar biasa (*extradionary measure*) yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam menangani suatu ancaman. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir ancaman yang terjadi. Di mana untuk melegitimasi tindakan yang diambil, adanya *speech act* menjadi komponen penting untuk membingkai isu ancaman tersebut sebagai situasi darurat.

Maka dalam penelitian ini terdapat proses sekuritisasi sejak WHO mendeklarasikan corona virus (COVID--19) sebagai pandemi global karena telah menyebar ke berbagai negara belahan dunia. Dengan adanya imbauan WHO yang menyerukan pemerintah dalam suatu negara untuk mulai mengambil tindakan untuk menekan penyebaran lebih luas dengan menetapkan protokol kesehatan sebagai pencegahan utama. Karena tingkat penyebaran virus sangat besar dan belum tersedianya vaksin yang

mampu menekan penyebaran virus tersebut. Di mana virus ini telah menyerang manusia hingga memiliki resiko kematian yang tinggi apabila tidak ditindak lanjuti dengan serius.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh dan menganalisa data-data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis yakni tentang Aspek Biopolitik Dalam Sekuritisasi COVID-19 oleh WHO. Kemudian dalam penelitian ini, penulis menjelaskan fenomena yang diangkat dalam judul penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini nantinya mampu menjelaskan atau menjawab pertanyaan tentang aspek biopolitik dalam sekuritisasi COVID-19 oleh WHO.

Dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif. Di mana dengan pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan mengumpulkan informasi atau data-data informasi melalui buku-buku yang bersifat akademik, makalah yang bersifat akademik, jurnal, artikel-artikel dari

media, seperti melalui media cetak, ataupun media online, dokumen resmi, laporan dari berbagai organisasi internasional, dan juga website yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan informasinya,serta semua sumber-sumber lain yang dapat menunjang penelitian ini, sehingga menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan waktu dari periode akhir tahun 2019 hingga 2020. Adapun ruang lingkup pembahasannya hanya terbatas pada bagaimana proses sekuritisasi WHO dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kemudian hal ini akan dianalisis melalui aspek-aspek biopolitik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pembahasan

A. Biopolitik: Pemikiran Relasi

Kekuasaan Foucault

Pada politik modern abad ini, adanya kekuasaan menjadi penting dalam melakukan praktik pendisiplinan dan kontrol terhadap masyarakat untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Adapun mekanisme kerja kekuasaan dengan melakukan penaklukan pada biologis masyarakat yaitu dengan melibatkan

tubuh dan kehidupan manusia sebagai objek utama dalam mencapai tujuannya. Secara tradisional pemahaman tentang biopolitik sebagaimana yang didefinisikan oleh salah satu pakar postmodernis yaitu Michel Foucault yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di kota Poitiers menyatakan bahwa kehidupan manusia dibentuk melalui adanya dua mekanisme kalkulasi eksplisit oleh pemerintah di suatu negara. Yang pada akhirnya biopolitik memiliki arti tentang kekuatan untuk hidup, baik hidup sebagai manusia sosial maupun secara ekonomi.

Dengan pemikirannya analisisnya yang kritis dan tajam tentang berbagai hal, baik dalam sejarah, episteme, wacana, kekuasaan, dan pengetahuan telah mampu memberikan warna baru dalam pemikiran postmodernisme pada abad modern saat ini. Pandangan Foucault tentang kekuasaan telah mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian. Adanya fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi. Pada perspektif Weber tentang kekuasaan yang dijanjikan negara lebih menggunakan

model kedaulatan (sovereign power), yang mana pada mekanismenya dalam mengatur perilaku warga dan sumberdaya mengikuti landasan legitimasi hukum. Sedangkan pada pandangan Foucault tentang relasi kekuasaan yang berbentuk disciplinary power yakni pendisiplinan terhadap biologis tubuh individu. Disciplinary power adalah teknologi kekuasaan yang dijalankan negara atau institusi untuk mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi patuh dan berguna. Model Kekuasaan ini pada berusaha menciptakan situasi di mana tubuh individu dapat menginternalisasikan penundukan dan menjadikannya seolah sebagai suatu keadaan yang normal. sehingga hal tersebut dinyatakan

Foucault sebagai praktik normalisasi dari berlangsungnya kekuasaan terhadap tubuh individu. Di mana menurut Foucault, kekuasaan harus dipandang dalam bentuk yang jamak, positif, produktif, dan relasional. Tidak ada bentuk tunggal pada kekuasaan. Kekuasaan mampu menyebar dalam semua relasi sosial yang dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang heterogen.

Biopower bagi Foucault beroperasi melalui dua mekanisme hubungan yaitu antara anatomo-politik dan bio-politik. Di mana pada anatomi politik lebih menunjukkan konfigurasi pada tubuh manusia sebagai alat mesin produktif. Hal ini lebih mencakup pada disiplin ilmu dalam pengetahuan seperti kedokteran dan bentuk praktik disiplin terutama dalam menjaga diri. Kemudian pada biopolitik lebih menargetkan populasi dengan menunjukkan peraturan dan intervensi kepada tubuh manusia seperti adanya bentuk kontrol berupa pengetahuan yang berkaitan dalam hal umur panjang, kontrol reproduksi, sanitasi perkotaan dan kebersihan sosial merupakan salah satu contoh intervensi yang dilakukan oleh negara dalam mengatur kehidupan dan kependudukan. Dengan demikian kedua hal tersebut merupakan bentuk wacana strategi yang diterapkan oleh pemerintah atau institusi sebagai alat kontrol dalam pendiMenurut Foucault, adanya kuasa (power) yang kemudian disertakan dengan pengetahuan (knowledge) merupakan syarat untuk memahami makna dan ruang lingkup biopolitik. Di mana adanya kuasa di bentuk dan didukung melalui

pengetahuan yang mana akan membangun suatu rezim kebenaran (regime of true). Sehingga dapat dikatakan keterkaitan kuasa dan pengetahuan sangat erat dalam memahami biopower. Kuasa dan pengetahuan dalam mekanisme biopolitik bekerja melalui regulasi atau anjuran-anjuran yang dapat dianggap sebagai tindakan yang positif, produktif dan relasional untuk dilakukan oleh masyarakat modern. Di mana eksistensi biologis masyarakat merupakan target utama dalam melakukan pendisiplinan dari strategi kontrol dan intervensi politik oleh pemerintahan dalam suatu negarasiplinan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan melalui biopower.

Kuasa dan pengetahuan dalam mekanisme biopolitik bekerja melalui regulasi atau anjuran-anjuran yang dapat dianggap sebagai tindakan yang positif, produktif dan relasional untuk dilakukan oleh masyarakat modern. Di mana eksistensi biologis masyarakat merupakan target utama dalam melakukan pendisiplinan dari strategi kontrol dan intervensi politik oleh pemerintahan dalam suatu negara. Di

mana strategi dalam mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan melakukan internalisasi secara tidak sadar terhadap suatu populasi agar menjadi patuh dan tunduk. Bentuk manifestasi terbaru pada kekuasaan dijamin politik modern saat ini menurut Foucault tidak hanya sekedar melalui metode pendisiplinan, akan tetapi adanya model pemerintahan (*governmentality*).

Menurut Foucault gagasan tentang hubungan *governmentality* dan subjek melihat bahwa kekuasaan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang dihadapkan pada subyek. Konsepsi ini tidak hanya mempradugakan keberadaan subjek-subjek yang sadar dalam merespon hubungan kekuasaan, namun juga mengisyaratkan adanya kekuasaan yang menghadiri subyek tersebut. Dalam gagasan berikutnya Foucault melihat adanya penguasaan dengan melalui rezim kebenaran. Kemudian Foucault menunjukkan *governmetalit* semakin terlihat dengan menciptakan seperangkat teknologi untuk melakukan *subjectivity*, yakni dengan pendisiplinan tubuh dan *biopower*.

Pada praktik *governmentality*, populasi merupakan subjek dalam melakukan pendisiplinan dan kontrol terhadap tubuh. Sehingga untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek maka masyarakat diberi pemahaman dalam artian pengetahuan yang dianggap positif sehingga apa yang mereka tidak dapat lakukan untuk negara dapat dilakukan melalui srangkaian strategi, kebijakan yang telah dibuat oleh negara. Upaya pada *governmentalty* dengan memanfaatkan berbagai teknik strategi dan bidang-bidang pengetahuan tertentu agar kepercayaan dan opini yang telah dibentuk dalam pikiran dan kesadaran manusia dapat diarahkan secara efisien. Sehingga dengan melalui *govenmentality* maka kekuasaan tersebut akan di internalisasikan dalam tubuh sosial sehingga *biopolitik* tersebut akan terwujud.

B. Sekuritisasi COVID-19 WHO

Kemunculan wabah virus yang dinyatakan sebagai pandemi bukan pertama kali terjadi kali ini saja. Beberapa tahun lalu terdapat wabah penyakit lain yang menyebar dan

dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO (World Health Organization) seperti HIV/AIDS, Influenza, SARS, dan kolera. Sehingga kemunculan wabah virus COVID-19 pada akhir tahun 2019 tidak menjadi kali pertama bagi negara didunia untuk menghadapi tantangan yang terjadi akibat munculnya wabah virus tersebut. Awal kemunculan wabah virus 2019nCov (novel coronavirus) atau saat ini lebih dikenal dengan COVID-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei China pada 31 Desember 2019. Hal tersebut diketahui ketika terdapat laporan oleh pemerintah China yang melaporkan hasil temuan laboratorim ke WHO yang menyatakan adanya virus yang menyerang manusia seperti penumonia (radang paru-paru). Ketika diteliti lebih lanjut penyebaran COVID19 diketahui melalui udara dengan ditularkannya melalui cipratan (*droplet*) dari batuk maupun bersin.

Sejak kemunculannya penyebaran yang terjadi akibat COVID-19 diketahui tidak hanya menyebar dikota Wuhan namun juga telah ditemukan diluar area geografis yang lebih luas dan melewati lintas batas negara. Kemudian tingkat

penyebaran kasus COVID-19 terus bertambah dan menyebar ke berbagai negara. Sehingga dengan karakteristik tingkat penyebaran yang sangat cepat, keberadaan virus sulit terdeteksi dan mengakibatkan resiko kematian yang cukup tinggi maka menjadikan virus ini berbahaya dan menjadi ancaman yang tidak hanya bagi keamanan negara, namun juga keamanan manusia. Pada perkembangannya telah tercatat pada April 2020 kasus positif akibat virus covid-19 telah mencapai 2,7 juta jiwa diseluruh dunia. Pada Oktober 2020 jumlah total kasus COVID-19 telah meningkat sangat tinggi yaitu mencapai 35.692.475 juta kasus yang terinfeksi COVID-19 diseluruh dunia dengan total kematian mencapai sebanyak 1.045.823 juta jiwa dan kesembuhan sebanyak 26.853.031 orang.

World Health Organization (WHO) merupakan Organisasi Kesehatan Dunia dan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertindak sebagai kordinator kesehatan internasional. WHO memegang peranan penting dalam mengendalikan penyebar wabah penyakit virus yang

dianggap dapat mengancam keamanan manusia global, seperti malaria, HIV/AIDS, Kolera, dan juga yang tengah dihadapi saat ini oleh seluruh negara yaitu pandemi COVID-19. Sebelum WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, WHO telah menekankan pada seluruh negara anggota dan masyarakat dunia untuk mulai melakukan upaya langkah-langkah pencegahan meskipun WHO masih menyatakan virus corona baru sebagai “keadaan darurat China” belum sebagai darurat internasional. Dalam hal ini pada tanggal 30 Januari 2020 WHO dengan mengikuti imbauan dari

International Health Regulation (IHR) melalui *Emergency Committee*, Direktur

Jendral WHO, Tedros Adhanom

Ghebreyesus menyatakan wabah virus corona di Cina sebagai situasi darurat kesehatan global sehingga memerlukan penanganan internasional atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Di mana PHEIC ditujukan sebagai peristiwa luar biasa yang dianggap memiliki risiko tinggi

bagi kesehatan publik dinegara lain dengan melalui penyebaran wabah penyakit internasional sehingga hal tersebut memerlukan respons internasional yang terkoordinasi terhadap wabah tersebut.

Pengambilan keputusan tersebut tidak secara langsung ditetapkan oleh WHO, Namun dengan pertimbangan oleh *Emergency Commite* yang dibentuk oleh WHO dengan mengikuti landasan IHR 2005. IHR merupakan landasan pengaturan atau instrumen hukum internasional yang mengikat pada WHO dan semua negara anggota untuk meminimalisir penyebaran wabah penyakit virus atau bakteri. Di mana untuk meminimalisir penyebaran virus yang melalui manusia, maka WHO menetapkan rekomendasi yang berkaitan dengan keamanan manusia yaitu berupa kebijakan screening yang dilakukan di bandara-bandara internasional. Kemudian meminta para otoritas kesehatan nasional diseluruh dunia untuk mulai melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pemantauan yang bersangkutan dengan keamanan kesehatan. Sejak diumumkannya statu PHEIC, penyebaran vrius corona semakin meningkat tiap harinya. Di mana

status PHEIC covid-19 berubah menjadi pandemi ketika penyebaran wabah virus telah masuk hampir sebagian negara didunia. Pada 4 maret 2020, terdapat 77 negara telah melaporkan kasus COVID19 dan selang beberapa hari ditetapkanlah COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2019.

Dengan adanya imbauan yang telah dikeluarkan oleh WHO bahwa pandemi COVID-19 merupakan ancaman global yang telah menciptakan krisis multidimensi tersebut, sehingga harus ditangani secara kolektif dan terkoordinasi baik antara negara, komunitas, dan masyarakat dunia. WHO sebagai kekuatan utama global dalam pengendalian virus agar tidak menyebar lebih luas telah membuat langkah-langkah strategis yang harus diikuti oleh negara anggota terutama untuk masyarakat dunia. Pada 3 Februari 2020 WHO mengeluarkan SPRP (*Strategic Preparedness and Response Plan*) COVID-19 yang bertujuan untuk mengarahkan langkah-langkah tindakan yang diambil agar terkoordinasi baik pada tingkat nasional, global, dan regional dalam melawan penyebaran virus. Seperti menyiapkan

sistem tanggap darurat untuk meningkatkan kapasitas untuk mendeteksi dan merawat pasien, memastikan rumah sakit memiliki ruang persediaan, dan personel yang dibutuhkan untuk mengembangkan intervensi medis yang dapat menyelamatkan pasien, dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Pada akhir bulan April 2020, dapat dikatakan WHO telah mengeluarkan gagasan *new normal* sebagai bentuk transisi untuk kembali ke kehidupan normal pasca pandemi. New normal yang digagas WHO merujuk pada kebutuhan untuk merancang dan melembagakan protokol baru berbasis standar kesehatan yang dibutuhkan dalam masa transisi sebelum aktivitas ekonomi dan sosial berfungsi kembali. Dalam hal ini, pematuhan protokol kesehatan yang telah diimbau oleh WHO, menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran virus yang harus diimplementasikan oleh negara kepada masyarakatnya. Setiap masyarakat individu harus mulai membiasakan untuk melindungi diri mereka dari penyebaran virus. Adanya anjuran protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO menjadi langkah strategi dasar yang harus diterapkan oleh masyarakat

dunia. WHO sebagai kekuatan utama di tingkat global yang mampu mempengaruhi negaranegara anggota dalam mengatur kebijakan untuk diimplementasikan dalam menekan penyebaran COVID-19. Seperti yang diketahui pada WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai status pandemi global. Semakin meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di berbagai negara, maka WHO sebagai aktor utama dalam mencegah penyebaran harus mengambil tindakan pencegahan untuk menekan penyebaran virus tersebut. Dengan adanya respon kebijakan terhadap pandemi global maka mencerminkan munculnya politik keamanan atau sekuritisasi. Di mana menurut Buzan, Waver, dan De Wild bahwa

“Security is the move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issues as an existential threat, requiring emergency measures and justifying actions outside the normal bounds of political procedure”

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat empat elemen penting yang diperlukan dalam menjelaskan proses sekuritisasi agar dapat berjalan. Pertama, dengan adanya isu yang dianggap sebagai

ancaman eksistensial terhadap keberlangsungan hidup yaitu objek rujukan (referent object), yang mana merupakan sebuah entitas yang posisinya dianggap sangat terancam jika suatu isu tidak ditangani secara serius. Kemudian adanya aktor sekuritisasi yang melakukan eskalasi yang pada mulanya bukan isu keamanan yang mengancam menjadi sebuah isu keamanan yang dapat mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup yang dinilai vital dan esensial bagi publik (audience). Sehingga untuk mewacanakan isu tersebut terdapat *speech act* sebagai bentuk pengonsepsian atau konstruksi terhadap suatu isu yang mengancam. Dengan demikian aktor sekuriti akan melakukan tindakan luar biasa (extradionary measuer) agar dapat menangani suatu ancaman. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kemungkinan suksesnya sekuritisasi maka perlu adanya aktor yang memiliki posisi otoritas dan modal sosial dan politik yang dapat meyakinkan publik tentang adanya suatu ancaman eksistensial.

Dalam hal ini dengan penetapan wabah virus corona sebagai ancaman

global merupakan hasil dari proses sekuritisasi kesehatan yang telah dilakukan oleh WHO. Di mana WHO sebagai organisasi kesehatan internasional berperan sebagai aktor sekuritisasi yang mana berupaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di tingkat global. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa isu virus corona merupakan bentuk ancaman eksistensial. Di mana dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat karena sulit terdeteksinya keberadaan virus yang mampu melewati lintas batas negara, dan tingkat penularan yang sangat tinggi antara manusia ke manusia sehingga telah mengancam keamanan manusia. Melalui Associated pers memperkirakan bahwa kini populasi dunia berjumlah lebih dari 7,6 miliar orang atau 10 persen diantaranya telah terinfeksi virus corona. Sehingga virus ini dapat dikatakan telah mengancam keamanan manusia melalui kesehatan fisik karena saat itu belum ada ketersediaan vaksin yang mampu mencegah virus tersebut. Dan juga dampak yang diakibatkan oleh COVID19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Oleh karena itu, WHO sebagai aktor sekuritisasi harus mengambil

langkah-langkah strategis untuk menekan penyebaran virus.

Tabel 1.1 Pernyataan WHO Tentang Pandemi COVID-19

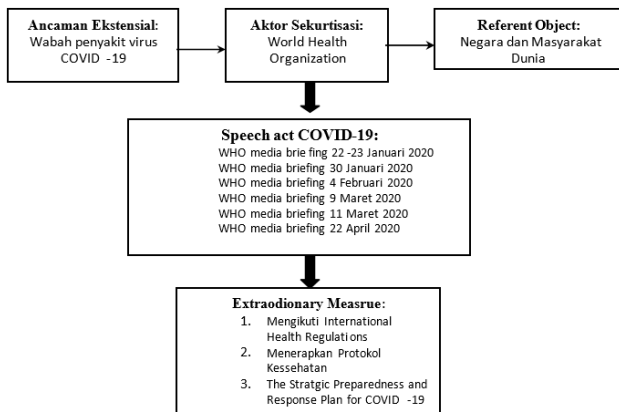
Tanggal	Pemimpin	Pernyataan
22 Januari 2020	Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom	Ini adalah situasi yang berkembang dan kompleks. Saya memutuskan untuk meminta Komite Darurat untuk bertemu lagi besok untuk melanjutkan diskusi dengan mereka. Keputusan tentang apakah atau tidak untuk mendeklarasikan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional adalah keputusan yang saya ambil dengan sangat serius
23 Januari 2020	Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom	Saya tidak menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional hari ini. Seperti kemarin, Komite Darurat terbagi atas apakah wabah virus corona baru mewakili PHEIC atau tidak. Ini adalah keadaan darurat di China, tetapi belum menjadi darurat kesehatan global. Ini mungkin belum menjadi satu. Penilaian risiko WHO adalah bahwa wabah adalah risiko yang sangat tinggi di China, dan risiko tinggi secara regional dan global
30 Januari 2020	Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom	Sekarang lebih dari 118.000 kasus di 114 negara, dan 4.291 orang telah kehilangan nyawa. WHO telah menilai wabah ini sepanjang waktu dan kami sangat prihatin dengan tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan, dan dengan tingkat kelambanan yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kami telah membuat penilaian bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi
4 Februari 2020	Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom	kami mengulangi seruan kami kepada semua negara untuk tidak memberlakukan pembatasan yang tidak sesuai dengan IHR. Pembatasan tersebut dapat memiliki efek meningkatkan ketakutan

		dan stigma, dengan sedikit manfaat kesehatan masyarakat
9 Maret 2020	Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom	Sekarang setelah virus tersebut menyebar di banyak negara, ancaman pandemi menjadi sangat nyata. Semua negara harus mengambil strategi terpadu yang komprehensif untuk mengendalikan epidemi mereka dan mendorong kembali virus mematikan ini. Negara-negara yang terus menemukan dan menguji kasus dan melacak kontak mereka tidak hanya melindungi rakyatnya sendiri, mereka juga dapat mempengaruhi apa yang terjadi di negara lain dan secara global
11 Maret 2020	Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom	Sekarang lebih dari 118.000 kasus di 114 negara, dan 4.291 orang telah kehilangan nyawa. WHO telah menilai wabah ini sepanjang waktu dan kami sangat prihatin dengan tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan, dan
		dengan tingkat kelambanan yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kami telah membuat penilaian bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi
22 April 2020	Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom	Secara global, hampir 2,5 juta kasus COVID-19 kini telah dilaporkan ke WHO, dan lebih dari 160.000 kematian. Harus ada "new normal" dunia yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih siap. Langkah-langkah kesehatan masyarakat yang sama yang telah kita anjurkan sejak awal pandemi harus tetap menjadi tulang punggung respons di semua negara

Speech act adalah poin penting dalam keberhasilan sekuritisasi. Audiensi dalam sekuritisasi ialah negara dan masyarakat global. Namun, pendekatannya lebih kepada masyarakat global sebagai sebuah entitas yang terancam keberlangsungan hidupnya sehingga menjadi objek rujukan (referent object) yang harus dilindungi dari penyebaran virus corona. Seperti yang diketahui bahwa angka yang terinfeksi secara global yang diakibatkan oleh COVID-19 diperkirakan telah mencapai sekitar 10 persen populasi dunia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi.

WHO pertama kali melakukan *speech act* dengan melalui proses penetapan wabah virus COVID-19 yang melanda China sebagai status PHEIC. Status PHEIC yang dikeluarkan WHO berhasil memberikan respon pada seluruh negara terutama pada masyarakat untuk bersiap melakukan tindakan pencegahan dengan memberlakukan screening di seluruh wilayahnya dengan membatasi keluar-masuk masyarakat yang berasal dari China. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dirjen WHO yaitu “seluruh negara harus

Grafik 1.1 Bagan Proses Sekuritisasi COVID-19



mengambil strategi terpadu yang komprehensif untuk mengendalikan epidemi mereka dan mendorong kembali virus mematikan ini. Negara-negara yang terus menemukan dan menguji kasus dan melacak kontak mereka tidak hanya melindungi rakyatnya sendiri”.

Dengan adanya informasi dari berbagai negara bahwa besarnya potensi virus telah menyebar semakin luas dan tingkat penularan yang tinggi ke seluruh masyarakat dunia, maka WHO menetapkan COVID-19 sebagai fase pandemic pada 11 Maret 2020. Keluarnya istilah pandemik tentu merujuk pada adanya suatu wabah penyakit atau virus yang menyebar di beberapa negara hingga lintas benua yang menyebabkan terjangkitnya sejumlah masyarakat di dunia. Oleh karena itu dengan penetapan COVID-19 sebagai pandemi tentu akan menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi seluruh negara dan masyarakat dunia. Ketakutan serta kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat dengan terjadinya panic buying hingga mulai menerapkan protokol kesehatan di awal pandemi merupakan

bentuk keberhasilan. WHO dalam mempengaruhi masyarakat dunia.

WHO telah menekankan seluruh negara anggota agar mulai mendisiplinkan masyarakatnya untuk mengikuti anjuran protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Bahkan beberapa negara bahkan melakukan tindakan lockdown skala besar untuk menekan transmisi COVID19 secara lebih luas. Sehingga adanya respon yang diberikan oleh audiensi yaitu negara dan masyarakat dunia merupakan parameter yang menentukan keberhasilan pada sekuritisasi yang dilahirkan oleh WHO. Di mana dalam sekuritisasi, adanya respon suatu negara ketika menghadapi pengumuman tentang ancaman eksistensial maka akan menimbulkan kepanikan yang berlebih serta diikuti dengan serangkaian kebijakan yang ditetapkan pada level domestik suatu negara. Dengan demikian apa yang telah disampaikan WHO tentang wabah virus corona sebagai ancaman yang memiliki potensi besar untuk menyebar sangat cepat dan menciptakan kekhawatiran kepada masyarakat merupakan bentuk kepercayaan oleh

negara dan masyarakat dunia terhadap pernyataan WHO.

Lebih lanjut, WHO sebagai aktor sekuritisasi dan lembaga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pandemi tentu telah mengeluarkan langkah-langkah rekomendasi kebijakan untuk diimplementasikan oleh negara-negara anggota sebagai bentuk untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kesehatan pada masyarakatnya dalam menghadapi ancaman penularan virus COVID-19. Adapun rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh WHO dalam sekuritisasi sebagai tindakan luar biasa (*extradionary measure*). Di mana sebagian besar negara dan masyarakat mulai menerapkan mekanisme pencegahan wabah virus corona sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan WHO yang ditetapkan dalam SPRP yaitu mekanisme tanggap darurat, melakukan komunikasi risiko dan keterlibatan publik, penemuan kasus dan pelacakan kontak, mematuhi langkah-langkah kesehatan masyarakat seperti kebersihan tangan, etiket pernapasan dan jarak sosial, pengujian laboratorium, mengobati pasien dan kesiapan rumah

sakit, pencegahan dan pengendalian infeksi dan melakukan pendekatan seluruh masyarakat dan pemerintah.

C. Dampak Sekuritisasi COVID-19 oleh WHO

Keberhasilan sekuritisasi oleh WHO dapat terlihat pada perubahan perilaku masyarakat dunia saat ini yang tidak terlepas dari penggunaan masker, menjaga jarak, selalu membawa handsanitizer atau desinfektan, hingga adanya penerapan untuk mulai beraktivitas seperti bekerja dan sekolah dalam rumah demi mencegah penyebaran virus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekuritisasi yang diciptakan oleh WHO telah berhasil mempengaruhi seluruh negara untuk memobilisasi masyarakatnya agar mulai mematuhi setiap aturan yang diberikan terutama dalam disiplin mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO. Adanya sekuritisasi yang diciptakan WHO pada dasarnya telah menciptakan kehidupan baru secara global. Di mana adanya *new normal* yang digagas WHO yang merujuk pada kebutuhan untuk merancang dan melembagakan protokol baru berbasis

standar kesehatan yang dibutuhkan dalam masa transisi sebelum dimulainya aktivitas ekonomi dan sosial berfungsi kembali. Protokol terkait dengan pola hidup dan perilaku yang bisa mencegah COVID-19 menjadi prasyarat yang harus dilakukan oleh individu dan diadopsi oleh institusi sosial, politik pemerintahan, dan ekonomi sebelum menjalankan kembali aktivitas.

Dengan diberlakukannya untuk seluruh masyarakat dunia agar mengikuti protokol kesehatan sehingga seluruh sektor kesehatan beroperasi penuh dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Di mana adanya panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak COVID-19 di tempat kerja khususnya di area perkantoran dan industri dimana banyak orang berkumpul dalam satu tempat. Kemudian memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala, menyediakan hand sanitizer dan sarana untuk mencuci tangan, melakukan self assesment untuk memastikan tidak terjangkit covid-19, melakukan pengecekan suhu tubuh (*skrining*) sebelum memasuki tempat yang dituju, dan

menerapkan physical distancing. Bahkan eluruh produktivitas dilakukan secara WFH (Work From Home) baik dalam dunia kerja Industri maupun pendidikan. masyarakat apabila ingin berpergian jauh telah diwajibkan untuk melakukan pengecekan kesehatan sebelum berpergian. Kemudian adanya lockdown yang dilakukan oleh beberapa negara disetiap daerahnya agar dapat menekan penyebaran virus. Rekomendasi kebijakan yang dibuat WHO tersebut dapat dikatakan cukup efektif dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Adapun beberapa negara lainnya yang menerapkan kebijakan lockdown dengan cepat ke berbagai daerah dan telah menutup akses keluar masuk dengan konsisten, perlahan, kemudian mampu mengontrol penyebaran virus Corona agar tidak menyebar lebih luas. Dengan demikian adanya new normal atau bentuk normalisasi baru dalam berkehidupan merupakan terminologi yang muncul sebagai respons atas COVID-19. Di mana istilah tersebut telah merujuk pada terciptanya tatanan baru sebagai bentuk respons atas situasi krisis yang sedang terjadi.

4.2 Hasil

Aspek Biopolitik Dalam Sekuritisasi COVID-19 Oleh WHO

Michael Foucault pada konsep biopolitik dijelaskan bahwa politik modern pada saat ini tidak hanya berbicara mengenai isu tentang perang dan perdamaian semata akan tetapi kini juga mulai memandang mengenai faktor biologis baik dalam kehidupan fisik, umur panjang hingga kesehatan manusia sebagai parameter dalam membangun kekuasaan. Begitu pula dalam konsep sekuritisasi, yang dibangun oleh pemikiran Waver dan yang lainnya bahwa keamanan tidak lagi hanya berfokus pada arah militeristik (state centrism) namun juga ancaman pada nonstate yang ditujukan pada isu-isu yang mengancam keamanan manusia (human security). Sebagaimana dalam mekanisme biopower atau biopolitik yang memandang bahwa adanya teknologi kuasa sebagai alat mesin produktif yang menargetkan suatu masyarakat sosial (populasi) dengan menunjukkan sebuah aturan atau intervensi pada tubuh manusia yang

berbentuk pendisiplinan dan kontrol. sehingga bentuk ekspansi yang di dominasi oleh adanya kekuatan politik telah menggeser pemikiran para penguasa politik, yang memandang bahwa eksistensi biologis manusia dapat menjadi sasaran dalam strategi politik dengan melalui intervensi (power) dalam bentuk pendisiplinan dan kontrol terhadap kehidupan manusia saat ini.

Politik modern pada abad ini telah melihat bahwa munculnya resiko ancaman keamanan yang dibentuk oleh otoritas penguasa merupakan strategi dalam menggambarkan tujuan untuk melakukan praktik pendisiplinan dan kontrol terhadap tubuh spesies. Di mana dengan memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat sebagai objek penting dalam melakukan penyebaran keamanan. Sehingga kekuasaan rezim kini terdapat praktik biopolitik yang mana menjadikan kehidupan manusia sebagai target dalam strategi politik dengan mengatasmakan keamanan. Adanya tindakan pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh penguasa diinternalisasikan dalam tubuh sosial sehingga model pendisiplinan dan

kontrol tersebut berjalan dalam tubuh individu. dan kemudian pola disiplin dan kontrol yang terdapat pada tubuh sosial akan melahirkan normalisasi kekuasaan. Disiplin merupakan bentuk dari normalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh individu. Beroperasinya kekuasaan yang dilegitimasi oleh rezim pengetahuan tertentu sebagai normalisasi itu juga berlangsung dalam ruang yang lebih luas, yakni terhadap tubuh sosial (population).

Sekuritisasi merupakan pemingkanaan proses yang membentuk aturan dengan melihat bagaimana suatu isu yang pada awalnya bukan sebagai ancaman menjadi ancaman ketika terdapat potensi yang mengakibatkan suatu keamanan dunia menjadi terancam. Sekuritisasi tercipta dikarenakan adanya isu yang menjadi ancaman global terutama yang berpotensi mengancam keamanan manusia (*human security*). Sehingga munculnya upaya sekuritisasi merupakan manifestasi untuk melindungi suatu entitas yang dianggap paling terancam oleh adanya suatu permasalahan. Oleh karena itu perlunya perlindungan dengan mengambil tindakan darurat agar dapat mempertahankan dan

melindungi keberlangsungan hidup tersebut. Maka pihak yang entitas posisinya terancam dalam sekuritisasi ini disebut dengan referent object. Dengan adanya referent object dalam hubungan praktik keamanan sebagai objek yang terancam, maka dalam biopolitik entitas yang terancam tersebut merupakan objek rujukannya dalam mengambil kehidupan manusia sebagai mekanisme dalam biopower.

Kekuasaan (*power*) mengambil kehidupan spesies sebagai objek rujukannya, dan munculnya tindakan keamanan dalam kehidupan manusia merupakan rangkaian strategi dalam biopolitik. Adanya hubungan antara biopolitik dan keamanan menjadi kunci untuk memahami perkembangan ini. Adanya pengendalian kehidupan melalui mekanisme pengawasan menempatkan kehidupan biologis sebagai objek dasar dalam keamanan.

Dalam Sekuritisasi isu yang dianggap sebagai ancaman eksistensial (*existensial threat*) merupakan ancaman yang telah diwacanakan oleh aktor sekuriti sebagai penguasa dalam pembentukan praktik sosial dalam

biopower. Di mana adanya proses wacana yang dilakukan dengan melalui retorika bahasa yaitu Speech act yang bertindak untuk menyebarkan adanya suatu isu yang dianggap akan berdampak buruk jika tidak segera ditangani. Sehingga dengan adanya pembingkaihan dalam proses sekuritisasi yang menyebar maka akan menciptakan sebuah wacana rezim kebenaran yang ada pada masyarakat. Dalam biopolitik dalam menjalankan strateginya dengan menggunakan produksi pengetahuan yang mana dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas tinggi untuk dapat mengontrol dan mengendalikan setiap individu ke dalam praktek kehidupan sosial. dalam konsep sekuritisasi, actor securitizing yang memiliki otoritas tinggi dalam mempengaruhi suatu isu menjadi ancaman, terdapat produksi pengetahuan yang dimiliki agar negara dan masyarakat global mampu menerima rezim wacana tersebut. Sehingga dengan adanya rezim wacana oleh kuasa dengan berupa pengetahuan hanyalah sebagai alat untuk dapat mengontrol dan medisiplinkan masyarakat sosial. Dengan pengetahuan menjadi cara untuk

kekuasaan memberikan paksaan terhadap diri melalui subjek tanpa memberi opini darimana adanya subjek tersebut.

Governmentality merupakan perluasan kekuasaan dalam bentuk pendisiplinan kekuasaan. Di mana objek pendisiplinan diri ialah tubuh individu, maka subjek *governmentality* adalah populasi (tubuh sosial). Dalam hal ini munculnya tindakan sekuritisasi dapat dikatakan untuk melakukan usaha pengontrolan dalam mengendalikan suatu permasalahan kemanan yang dianggap mengancam baik pada tingkat nasional maupun global. adapun objek yang dikendalikan agar isu keamanan tersebut agar tidak menciptakan dampak lebih besar dengan mengontrol dan mengendalikan suatu populasi dan sumberdaya alam yang dianggap sebagai aktor utama dalam masalah keamanan yang harus ditangani. Menurut Foucault, populasi menjadi subjek penting untuk membantu dalam memecahkan persoalan negara dengan mengambil langkah strategi yang tepat agar masyarakat dapat menerima wacana strategi tersebut. begitu pula pada isu keamanan, yang mana populasi

merupakan objek yang harus dilindungi dari adanya ancaman keamanan. lebih lanjut, tindakan dari isu keamanan yang dianggap mengancam agar dapat teratasi dengan melakukan tindakan sekuritisasi.

Munculnya wabah virus COVID19 sebagai pandemi global di akhir tahun 2019 secara langsung telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam melahirkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik ke dalam praktik dan norma baru. Di mana adanya perubahan langsung dalam kehidupan masyarakat dunia saat ini yang mengarah pada normalisasi yang dibentuk oleh kuasa dalam biopower. New normal yang merupakan implikasi dari adanya kepengaturan (*governmentality*) yang telah diproduksi oleh masyarakat dunia saat ini merupakan bentuk pendisiplinan dan kontrol yang sedang berjalan dalam praktik kehidupan sosial dengan melalui tubuh biologis manusia. Dimana wujud mekanisme dari kepengaturan WHO ialah dengan adanya wacana resiko COVID-19 yang dibuat menjadi sebuah ancaman keamanan manusia secara global sehingga menghasilkan

masyarakat yang dapat diatur dan patuh untuk mengikuti aturan protokol kesehatan dengan tujuan untuk menekan penyebaran COVID-19.

WHO sebagai otoritas tertinggi untuk memutuskan rantai penyebaran virus telah membuat rekomendasi kebijakan untuk diimplementasikan oleh negara dan masyarakat global. Dalam hal ini, sekuritisasi yang dibentuk oleh WHO untuk menekan penyebaran virus telah menjadi praktik sosial yang digunakan oleh masyarakat dunia untuk mencegah penularan virus COVID-19. Namun, dalam hal ini framing yang digunakan WHO dalam melakukan sekuritisasi COVID-19 sebagai masalah keamanan memiliki potensi untuk memunculkan aspek biopolitik di dalamnya. Dengan melalui konsep biopolitik Michel Foucault dalam mengkonstruksikan sekuritisasi WHO dalam menekan penyebaran COVID-19. Terlihat bahwa sekuritisasi COVID-19 oleh WHO merupakan bentuk penerapan dari biopower yang mana secara dominan memiliki kuasa dalam membentuk keputusan untuk diterapkan kepada masyarakat sosial di tiap negara.

Adanya aspek biopolitik yang terdapat pada sekuritisasi COVID-19 oleh WHO ialah dengan adanya intervensi yang berbentuk pendisiplinan dan kontrol yang ditargetkan pada tingkat populasi dunia saat ini. Di mana dengan adanya proses sekuritisasi yang dilakukan oleh WHO sebagai aktor sekuritisasi yang telah meringkai COVID-19 sebagai ancaman global hingga pandemi mampu menciptakan normalisasi baru dalam perilaku sosial saat ini dengan melalui *governmentality* dalam biopower.

Populasi sebagai target dalam pengimplementasian biopolitik yang telah diciptakan melalui proses sekuritisasi. Dengan rekomendasi kebijakan oleh WHO agar seluruh masyarakat dunia mengikuti aturan yang telah ditetapkan, terutama dalam mematuhi standar

5. Kesimpulan

Wabah virus corona merupakan ancaman global yang telah mempengaruhi seluruh aspek tatanan kehidupan global baik sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, terutama pada keamanan manusia.

protokol kesehatan sebagai dasar awal dalam menekan penyebaran virus dari manusia ke manusia lebih luas. Seperti melakukan *social distancing*, pemakaian masker, rajin mencuci tangan hingga berkembang dengan mekanisme *work from home*, *distance learning*, hingga adanya kebijakan *lockdown* baik dalam skala besar hingga kecil. Sehingga hal tersebut kemudian menjadi kebiasaan baru dalam aspek kehidupan sosial saat ini. Lahirnya normalisasi baru sebagai alasan pencegahan virus, yang mana dianggap sebagai ancaman sehingga memunculkan sekuritisasi oleh WHO telah menjadi pintu masuk dalam biopolitik dengan adanya pengawasan pendisiplinan dan kontrol terhadap masyarakat dunia dinegaranya.

Karena penyebaran virus tersebut sangat cepat antar manusia ke manusia hingga memiliki tingkat resiko kematian yang sangat tinggi. WHO dalam menekan penyebaran virus dengan melakukan upaya sekuritisasi agar seluruh elemen masyarakat dunia dapat secara kolektif melakukan tindakan pencegahan dengan mengikuti

rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai lembaga kesehatan internasional. Upaya sekuritisasi COVID-19 yang telah dilakukan WHO agar masyarakat dunia untuk mulai mengikuti anjuran protokol kesehatan telah berhasil memunculkan aspek biopolitik. Di mana terdapat pengawasan berupa pendisiplinan dan kontrol dalam kehidupan masyarakat global dan telah menciptakan normalisasi baru pada aspek kehidupan dunia saat ini.

Daftar Pustaka

- Nadesan, Maja Holmer:
Governmentality,
Biopower, and Everyday Life.
Routledge Studies in social and
political thought; 1965.
- Kiersey, Nicholas J, dan Doug Stokes.
(Ed).
2014. Michel Foucault dan Hubungan
Internasional
Foucault, Michael. (1978). The history
of sexuality, vol. 1: The will to
knowledge. London: Penguin.
- Foucault, Michael. (1990). The history
of sexuality. Volume 1, An
introduction. New York, Vintage.
- Foucault, Michael. (1976). "Social Must
be Defended ; Lectures at the
college de france, 1975-76". New
York: Picador, 2003, pp 239-40
- Buzan, Barry, Wæver , Ole & de Wilde,
de Jaap (1998). Security: A New
Framework for Analysis, Boulder:
Lynne Rienner Publishers.
- Elbe, Stefan (2005). "Aids, Security,
biopolitics". Articiel in
International Relations, University
of Sussex.
Vol.19(4). h. 403-419
- Huysmans, Jef.
(1998). "Security! What do
You Mean? From Concept to Thick
Signifier". European Journal of
International Relations 4:2.
- Mudofir, Abdil M, (2013). Teori
Kekuasaan
Michael Foucault: Tantangan Bagi
Sosiologi Politik. Jurnal Sosiologi
Masyarakat, Vol.18, No.1 Ramadhan,
Iqbal. (2020). "Securitization of
COVID-19 and State's Response
to Mitigate Pandemic Threat".
International
Relations Departement, Universitas
Pertamina. Vol. 3, No.2
- Connelly, Aaron L. (2017).
"Indonesia's new North Natuna
Sea: What's in a name?, Lowy
Institute, Diakses
melalui([https://www.lowyinstitute.
org/the-interpreter/indonesia-s-](https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-)

- new-northnatuna-sea-what-s-name
(05/03/2021)
- Eroukhmanoff, Clara, (2017) .
Securitisation Theory. (S.
McGlinchey, Editor) EInternational
Relations (pp. 105). Bristol,
England. ISBN 978-1-910814-20-8.
Retrieved from Diakses dalam
<http://www.e-ir.info/students>
(05/03/2021)
- Kalpokus, Ignas. (2020). The
Biopolitical of COVID-19: The
Purge Governmentality of Life,
LCC International University.
Diakses melalui
<https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/53582> (05/03/2021)
- Stefcu, Nichoel. (2020) . “ Biopolitics in
the
COVID-19 Pandemic”. Philosophy of
Science, Misc, Drobeta Turnu
Severin: MultiMedia Publishin
Sudradjat, Iwan. (2018). “Michael
Foucault:
Power/Knowledge, Ruang dan
Arsitektur”, Institut Teknologi Bandung
- WHO, (2020). “WHO Director
General's opening remarks at the
media briefing on COVID-19 - 11
March 2020”, diakses melalui:
<https://www.who.int/directorgeneral/speeches/detail/who-directorgeneral-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020>
(08/06/2021)
- WHO, “WHO Director-General's
statement on the advice of the IHR
Emergency
Committee on Novel Coronavirus”
Speeches, diakses dalam
[https://www.who.int/directorgeneral/speeches/detail/who-directorgeneral-s-statement-on-ihr-emergencycommittee-on-novel-coronavirus-\(2019ncov\)](https://www.who.int/directorgeneral/speeches/detail/who-directorgeneral-s-statement-on-ihr-emergencycommittee-on-novel-coronavirus-(2019ncov)))
(08/06/2021)
- WHO, “WHO Director-General's
statement on the advice of the IHR
Emergency Committee on Novel
Coronavirus” Speeches. Diakses
melalui
<https://www.who.int/directorgeneral/speeches/detail/who-directorgeneral-s-statement-on-the-advice-of-theihr-emergency-committee-on-novelcoronavirus>
(08/06/2021)
- World Health Organization, (2020).
“COVID-19 Public Health Emergency
of International Concern (PHEIC)
Global research and innovation
forum” diakses melalui :

[https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-\(pheic\)-global-research-and-innovation-forum](https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum)

(20/02/2021)

World Health Organization, (2020).

Strategic Response and Preparedness

Plan (SRP), "WHO COVID-19

preparedness and response progress

report 1 February to 30 June 2020"

diakses melalui

<https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf>

(20/02/2021)

WHO, (2020). Statement on the second

meeting of the International Health

Regulations (2005) Emergency

Committee regarding the outbreak

of novel coronavirus (2019-nCoV).

Diakses melalui

[https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))

[\(2019-ncov \)](https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)) (05/06/2021)

WHO, (2020). Listings of WHO's

response to COVID-19. Diakses

melalui

<https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covid-timeline>

(28/06/2021)

AP News. (2020), "WHO: 10% of

world's people may have been

infected with virus",. diakses

melalui :

<https://apnews.com/article/virus-outbreak-archive-united-nations54a3a5869c9ae4ee623497691e796083>

BBC News Indonesia. (2020). PSBB

Jakarta Mulai 10 April Selama Dua

Minggu,

Namun Pakar Menyebut Hasil Efektif

Satu Bulan Untuk Tekan COVID-

19. Diakses melalui

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-a-52194441> (26/05/2021)

CNN Indonesia. WHO Nyatakan virys

Corona Ancaman Serius bagi

Dunia. di akses dalam

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200211210415-134-473770/whonyatakan-virus-corona-ancaman-seriusbagi-dunia>

(08/06/2021)

CNBC Indonesia. Selain China Virus

Corona Menyebar ke Negara-

Negara ini. Diakses melalui

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200126173350-4->

[132829/selain-chinavirus-corona-menyebar-ke-negaranegara-ini](#)

(26/05/2021) Kompas.com, (2020),

“WHO: 1 dari 10

Orang di Dunia telah tertular Covid -

19”, Diakses melalui

<https://www.kompas.com/sains/rea>

[d/2020/10/06/183200523/who--1-](#)

[dari-10orang-di-dunia-telah-](#)

[tertular-covid-](#)

[19?page=all](#) (12/02/2021)

Kompas.com, (2020). “WHO

Resmi Sebut

Virus Corona Covid-19 sebagai

Pandemi Global”. Diakses melalui

<https://www.kompas.com/sains/rea>

[d/2020/03/12/083129823/who-](#)

[resmi-sebutvirus-corona-covid-19-](#)

[sebagai-pandemiglobal?page=all](#)

(12/02/2021)

Pharmeaceutical Technology, (2020).

Coronavirus: A timeline of how

the deadly COVID-19 outbreak is

evolving. Global data. Diakses

melalui

<https://www.pharmaceuticaltechn>

[ology.com/news/coronavirus-](#)

[atimeline-of-how-the-deadly-](#)

[outbreakevolved](#) (15/03/2021)

Start News, (2020). Helath: WHO

declares coronavirus outbreak a

global health emergency. Diakses

melalui

<https://www.statnews.com/2020/0>

[1/30/w ho-declares-coronavirus-](#)

[outbreak-aglobal-health-](#)

[emergency/](#) (05/06/2021)

Reuters. China and World Health

Organization during COVID-19

crisis. Diakses dalam

<https://www.reuters.com/world/chi>

[na/chi na-world-health-](#)

[organization-duringcovid-19-crisis-](#)

[2021-01-13/](#)

(08/06/2021)